

Disharmoni Sosial Masyarakat Kampung Kota di Era Demokratisasi (Konflik dan Disharmoni Sosial di Yogyakarta Pada Pilpres tahun 2019)

Muhammad Arifin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Koresponden: muhammad.arifin@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT

Democracy that has lasted so far is not only understood as an effort to build a better government system but is also intended as an effort to create citizen participation in building a good political and governance system. But in reality, it does not produce a sense of security, peace, order and social order. This paper is intended to look at the phenomenon of democracy, especially election practices, not only from a political and power perspective, but also to see how elections actually create social disharmony in the Yogyakarta city community. This paper is based on one argument, namely: that democracy is intended to build a more open, just, peaceful and prosperous society that does not work properly because the understanding and practices of democracy that have been practiced so far have actually led to increased resistance and social disharmony. This paper uses a qualitative analytical method with data sourced from direct observation and from local newspapers. From this research it was found that (1) social conflict in villages, especially in Yogyakarta is getting higher and social resistance is increasing; (2) Community grouping, and segregation tend to be based on religious and political affiliations; and village gangs (3) Villages that used to be administratively separated, were instead claimed as the village of certain groups which referred to certain religious-based groups or parties. From this paper it can be concluded that the conflicts that occurred in the city of Yogyakarta during the 2019 presidential election were more caused by village-based sentiments and solidarity of certain parties and groups rather than conflicts between elites.

Keyword: Democratization, social disharmony, social conflict, social solidarity

PENDAHULUAN

Demokrasi yang berlangsung selama ini tidak hanya dipahami sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih baik (Zuhro, 2019:70), akan tetapi juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan partisipasi warga (Sinaga, 2012:55; Haliim, 2016:21) dalam membangun sistem politik dan pemerintahan yang baik. Esensi dari partisipasi adalah terciptanya rasa adil, kesejahteraan dan keteraturan sosial, atau terciptanya masyarakat madani (Santoso, 2011:55). Namun dua puluh tahun terakhir sejak reformasi tahun 1998, praktek demokrasi yang berjalan justru tidak menghasilkan rasa aman, damai, ketertiban dan keteraturan sosial sebagaimana diharapkan sebelumnya. Sebaliknya, eskalasi konflik (Surwandono, 20015), resistensi dan disharmoni sosial, khususnya di kampung Kota Yogyakarta justru menunjukkan

peningkatan yang signifikan. Berdasarkan penelusuran Masyarakat Anti Korupsi Yogyakarta, konflik sosial berkaitan dengan praktek demokrasi (khususnya dalam pilpres dan pilkada) sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. (<https://nasional.tempo./read/7/04/2014>). Bahkan berdasarkan informasi yang dikutip dari laman <https://mediaindonesia.com/read/22/02/2019> dan <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/27> ditegaskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah rawan konflik kedua di Indonesia setelah Papua Barat dengan indeks kerawanan 52,14 di bawah Papua Barat yang menempati urutan pertama dengan persentase 52,83.

Sejauh ini, studi tentang demokrasi sebagai konsep, cenderung melihat pada 3 aspek secara mendasar. Pertama, demokrasi dilihat sebagai wacana global dan transnasional (Dryzek, 2016; Dalhatu, 2019; O'Loughlin, 2016); Kedua, studi yang melihat demokrasi sebagai bentuk pelembagaan kekuasaan, hegemoni dan manajemen konflik (Stokke, 2018); dan ketiga adalah melihat demokrasi dari sisi teori dan konseptual (Cederman, dkk, 2008; Scholte, 2019; Welzel, 2006; Remmer, 2015; Nugroho, 2012). Dari ketiga kecenderungan studi tersebut tampak bahwa studi tentang dampak negatif dari praktek-praktek dan penyelenggaraan demokrasi, justru bisa berdampak lahirnya konflik dan resistensi sosial, masih minim dilakukan.

Berbagai studi yang pernah dilakukan berkaitan dengan fenomena konflik atau kekerasan sebagaimana dipaparkan sudah ada yang pernah melakukan, misalnya oleh CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Universitas Gadjah Mada tentang kekerasan minoritas di Yogyakarta (Ahnaf & Hairus Salim H. S., 2017); Konflik dalam praktek demokrasi di arena kampus Unesa Tahun 2020 (Syafitri, dan Sarwono, 2021) dan Konflik Pasca pemilihan kepala Desa Jembatan Merah di Gorontalo tahun 2019 (Usman dan Marzaman (2019) dan beberapa konflik yang terjadi pasca dan setelah pilkada dan Pilpres beberapa tahun yang lalu di beberapa wilayah di Indonesia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dari berbagai studi yang cenderung melihat fenomena demokrasi, khususnya praktek pemilu dan pilkada hanya dari sisi politik dan kekuasaan semata, atau berbagai tulisan yang hanya melihat fenomena disharmoni sosial komunitas kota yang hanya dianggap sebagai fenomena sosial ekonomi semata.

Tulisan ini didasarkan pada satu argument, yaitu: bahwa demokrasi dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang lebih terbuka, adil, damai dan sejahtera tidak berjalan semestinya karena pemahaman dan praktik-praktik demokrasi yang dipraktikkan selama ini justru menyebabkan semakin meningkatkan resistensi dan disharmoni sosial. Sebagai contoh; (1) Konflik sosial di kampung-kampung,

khususnya di Yogyakarta semakin tinggi dan meningkatnya resistensi sosial, padahal dulunya dikenal sebagai masyarakat yang hidup damai, guyub dan harmonis; (2) Pengelompokan dan segregasi masyarakat cenderung berbasis afiliasi agama dan politik, yang sebelumnya hidup rukun dalam ikatan tradisi, walaupun ada klaim hanya sebatas klaim kelompok pemuda atau geng; (3) Kampung-kampung yang dulunya terpisah secara administrasi, justru diklaim sebagai kampung kelompok tertentu yang merujuk pada kelompok berbasis keagamaan atau partai tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitik dengan penekanan sumber data lebih banyak pada hasil pengamatan langsung selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pilpres 2019 dan analisis berita dari media koran lokal yang memuat berita tentang konflik dan resistensi yang terjadi selama pelaksanaan pilpres di Yogyakarta tahun 2019. Pada konteks ini, wacana yang terbentuk selama periode pilpres penulis melihatnya sebagai sebuah fenomena demokratisasi yang justru tidak menciptakan suasana yang harmonis dan demokratis.

Demokratisasi merupakan proses dinamis dengan banyak ancaman umum yang membutuhkan kewaspadaan dan adaptasi secara terus-menerus (Goodman, 2021). Ada dua definisi demokrasi yang diutarakan oleh Mundt (2018), yakni "*limited government or some minimal level of pluralism*". Bagi penguasa/petahana, selalu ada banyak alasan bagus mengapa demokratisasi "tidak sesuai dengan kepentingan bangsa saat ini" (Mundt, 2018). Dasar pemikiran ini benar-benar berlaku bagi banyak pengamat karena demokrasi seringkali (dan mungkin secara definisi) diasosiasikan dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan (Mundt, 2018). Untuk alasan apa pun, demokratisasi pada umumnya merupakan produk dari kegagalan rezim otoriter untuk mempertahankan kontrol yang efektif, ia biasanya tumbuh dari situasi di mana tidak satu pun dari beberapa elit yang bersaing memiliki sumber daya untuk mencapai kendali penuh, dan di mana kesepakatan untuk membatasi dan berbagi adalah pilihan terbaik yang tersedia bagi para pesaing yang secara kolektif dapat memaksakan tatanan baru (Mundt, 2018). Singkatnya, demokratisasi tumbuh dari erosi kekuasaan dan kebuntuan (Mundt, 2018).

Demokratisasi difasilitasi oleh kesepakatan regional dan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial (Goodman, 2021). Lebih khusus lagi, ada studi menarik yang dilakukan oleh Goryacheva (2016) yakni tentang demokratisasi media yang tengah menjadi topik hangat di hampir semua negara di Amerika Selatan. Di negara-negara tersebut, tuntutan reformasi dan konflik politik muncul karena ketidaksesuaian antara media massa yang terkonsentrasi, komersial, dan seringkali konservatif di satu sisi, dan posisi politik pemerintah kiri-tengah serta tuntutan sosial untuk demokrasi

partisipatif di sisi lain (Goryacheva, 2016). Akhirnya, studi yang dilakukan oleh Goryacheva (2016) menemukan bahwa perjuangan atas demokratisasi media berakar pada perkembangan sosial dan politik yang lebih besar termasuk pergeseran kekuasaan yang konfliktual.

Realitasnya dalam praktek demokrasi selama, justru sering menimbulkan konflik dan disharmoni sosial. Studi disharmoni sosial banyak yang berlatar belakang kehidupan keberagaman sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Walsh *et al.* (2020), Howie *et al.* (2021), Keddie (2014) dan Westerlund *et al.* (2022). Disharmoni sosial ini mencakup saat-saat perebutan identitas (Berglund and Schwartz, 2013). Di dalamnya, ada hambatan integrasi antar masyarakat. Menurut Alaverdov (2021), perbedaan lingkungan budaya dan agama yang kuat dan mengakar menjadi hambatan serius bagi integrasi sosial. Selain itu, ada penyebab lain ketidakharmonisan, yakni ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan norma dan aturan, ketidaksamaan paradigma, juga karena pola kepemimpinan otoriter (Iska *et al.*, 2022). Rennuy (2019) pun menyatakan bahwa ketidakharmonisan diakibatkan oleh keterlibatan beberapa tatanan hukum yang tidak dapat disesuaikan. Sementara itu, Bannister and O'Sullivan (2013) lebih melihat ketiadaan atau kerusakan hubungan masyarakat sebagai penyebab ketidakharmonisan sosial yang disebut oleh Gupta, Sharma and Gupta (2021) dan Westerlund *et al.* (2022) dapat mengarah juga pada konflik di ranah keluarga dan masyarakat pada tingkat yang lebih lanjut. Oleh karena itu, tantangan utama bagi kebijakan adalah peningkatan kualitas hubungan masyarakat (Bannister and O'Sullivan, 2013).

Ketidakharmisan tidak ada begitu saja, akan tetapi ada hal-hal lain yang biasanya mengiringi ketidakharmonisan sosial antara lain perang dan kekerasan, ekstremisme dan terorisme, dan/atau politik publik yang bermusuhan (Howie *et al.*, 2021). Di Uni Emirat Arab (UEA), ketidakharmonisan sosial diawali oleh struktur demografis yang tidak stabil dan tidak seimbang sehingga menciptakan dominasi budaya (Al Oraimi, 2020). Semua keadaan ini selain berpengaruh terhadap keharmonisan komunal, juga terhadap kohesi sosial dan interaksi sosial langsung dari kelompok budaya yang mengarah pada ketegangan dan ketidaknyamanan di negara tersebut (Al Oraimi, 2020). Dalam studi lain, Howie *et al.* (2021) menawarkan suatu solusi atas adanya disharmoni sosial, yakni dengan merangkul perbedaan yang ada. Sementara itu, Bannister and O'Sullivan (2013) secara khusus mengusulkan bahwa koeksistensi damai dari berbagai kelompok sosial bertumpu pada keberadaan dan pemeliharaan empati antar-kelompok dan saling menghormati.

PEMBAHASAN

Intensitas Konflik Sosial Meningkat

Muncul berbagai kekhawatiran warga Yogyakarta setiap kali menjelang pesta demokrasi. Baik pada tingkat lokal berupa pemilihan kepala daerah (pilkada), maupun dalam skala nasional dengan pemilihan presiden (pilpres). Kekhawatiran ini sangatlah beralasan sebab setiap kali pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, berbagai benturan fisik, ataupun resistensi sosial antara para pendukung calon ataupun simpatisan partai selalu terjadi. Bahkan di luar dari kegiatan pesta demokrasi, gesekan-gesekan pun juga seringkali berlangsung hingga ke kampung-kampung dalam kota Yogyakarta dengan mengakibatkan adanya korban dan kerugian material.

Informasi yang didapatkan lewat media online menunjukkan bahwa konflik atau ketegangan sosial terus berlangsung saat berlangsungnya pilkada dan pilpres di Kota Yogyakarta dan sekitarnya dari tahun 2004 hingga tahun 2019, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini :

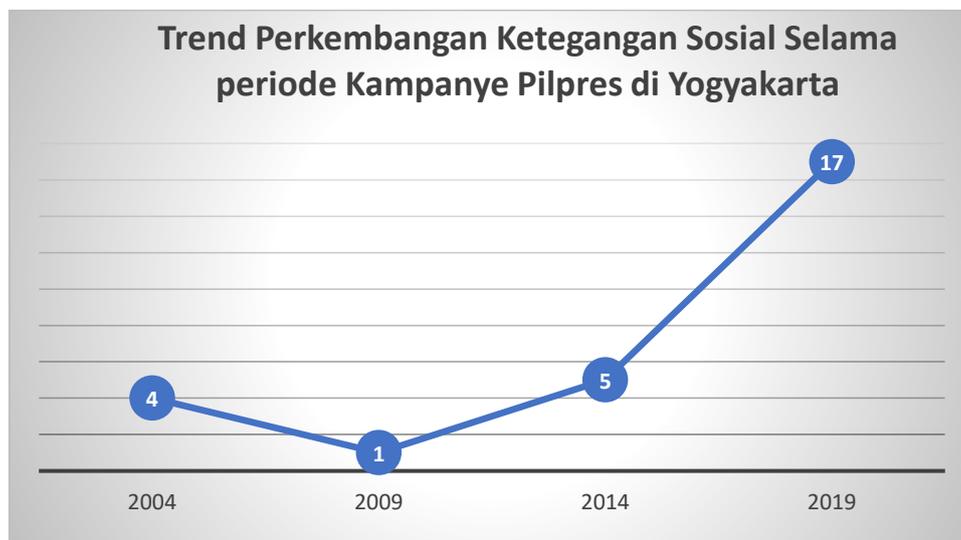
Tabel 1 Intensitas, Skala dan Frekuensi Konflik selama Pelaksanaan Kampanye Pilpres di Yogyakarta

Tahun	Jenis kejadian	Skala Konflik	Intensitas	Korban/ Kerugian Material	Sumber
2004	Bentrokan Massa PDI dgn Warga kampung	Meluas ke beberapa kampung di kota hingga ke Bantul	4 kali	2 Korban luka 4 motor rusak	https://nasional.tempo.co/read/40708/bawa-pedang-dan-clurit-massa-pdip-ditahan/16/03/2004
2009	Peristiwa bentrokan antara massa PDIP dan PPP di sekitar Pojok Beteng Wetan	dilokalisir	1 kali	Tdk ada	https://nasional.tempo.co/read/568493/bentrok-pendukung-partai-langgan-pemilu-di-yogya
2014	Bentrok kampanye antara PPP dengan PDIP tanggal 5 April 2014. Dikeroyok Ormas, Lima Motor Simpatisan Partai Dirusak, 5 April 2014	Lokasi konflik di parkir Ngabean, Krapyak, Jogokaryan, ring road selatan menuju ke Krapyak.) Lokasi: terjadi di Ngabean, Ngampilan, Kota	5 kali	5 motor	http://www.tribunnews.com/2014/04/06/; (https://daerah.sindonews.com/read/876711/22/) https://www.merdeka.com/peristiwa/26/06/2014

	Bentrokan antara massa PDIP dan massa PPP Di sisi utara jalan merupakan basis massa PDIP, di sisi selatan merupakan basis massa dari PPP (tanggal 4 Juni 2014)	Yogyakarta. Lokasi konflik di Jalan Letjen Suprpto.			
2019	<p>Dirilis Polda DIY, beberapa diantaranya al:</p> <p>Bentrokan Massa Pendukung PPP dan PDIP saat kampanye Kericuhan yang terjadi di Masjid Jogokariyan antara masyarakat setempat dan massa PDIP pada Minggu (27/1/2018)</p> <p>Bentrok antara parpol peserta Pemilu 2019 itu terjadi pada Minggu (23/12/2018)</p> <p>Bentrok antara massa PDIP vs PPP Kericuhan yang terjadi antara kubu PDIP dan PPP di Yogyakarta pada Minggu (27/1/2019)</p> <p>Konflik antara pendukung Prabowo Subianto dengan pendukung Jokowi (khususnya PDIP dan PPP (GPK) (27/2/2019).</p>	<p>Ketegangan selama kampanye di Yogyakarta dan sekitarnya</p> <p>Meluas ke Bantul dan Sleman</p> <p>Meluas ke kampung lainnya dan muncul sentiment agama di Bantul dan Yogyakarta.</p> <p>Dusun Jetak, Desa Ringinharjo, Bantul</p> <p>Ngabean/Ngampilan dan sekitarnya</p> <p>Yogyakarta & Sleman</p>	17 kali	<p>13 luka</p> <p>1 kritis</p> <p>5 motor rusak</p> <p>1 mbl terbakar</p> <p>3 mobil rusak</p> <p>Perusakan kantor Rama sakti</p> <p>5 rumah dirusak</p>	<p>https://tirto.id/dhXJ.</p> <p>https://www.beritasatu.com/nasional/29/01/2019</p> <p>https://tirto.id/dfim</p> <p>https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2018/12/24</p> <p>https://www.gatra.com/;</p> <p>https://radarjogja.co/2019/01/28/bentrok-kembali-pecah-dingabean/</p> <p>https://tirto.id/respons-ppp-khittah-pdip-soal-ricuh-kedatangan-prabowo-di-yogya-dhXJ</p>

Sumber : Pengolahan Data sekunder Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1, tampak bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus ketegangan atau gesekan antara simpatisan partai politik selama periode penyelenggaraan pilkada dan pilpres. Ketegangan ini berdasarkan catatan media mainstream sudah berlangsung sejak lama, yaitu berawal sekitar tahun 1999 setelah era reformasi, khususnya ketegangan antara Partai Persatuan pembangunan (PPP) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan dalam laporan Polda DIY, terjadi peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 17 kasus ketegangan yang sebelumnya hanya 5 kasus. Intensitas ketegangan ini seiring dengan meningkatnya eskalasi ketegangan yang sebelumnya hanya terfokus pada satu lokasi saja, sementara pada tahun 2019 makin meluas ke beberapa kampung kota Yogyakarta hingga ke kampung-kampung lainnya di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Demikian halnya jumlah korban luka dan kerugian material juga mengalami peningkatan di tahun yang sama. Khusus peningkatan jumlah ketegangan sosial dimaksud terlihat secara jelas pada chart 1 berikut:



Grafik 1. Peningkatan Intensitas Konflik Sosial berbasis Partai di Kota Yogyakarta
(Sumber: Pengolahan data sekunder tahun 2022)

Semakin meningkatnya intensitas, eskalasi dan jumlah korban serta kerugian pada periode pemilihan presiden tahun 2019 di Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 dan chart 1 di atas sejak awal sudah diprediksi oleh berbagai kalangan. Berbagai indikasi, diantaranya pertama, meningkatnya intensitas dan luasnya eskalasi konflik di Yogyakarta sudah berlangsung sejak lama, dan selalu terjadi hanya pada dua kelompok pendukung partai saja. Kedua, adalah lahirnya berbagai kelompok-kelompok berafiliasi keagamaan (Islam) di Yogyakarta dengan berbagai gerakan-gerakan yang seringkali dicap sebagai gerakan radikal. Ketiga, Kota Yogyakarta merupakan basis Partai Islam, PAN dan PPP dengan sejumlah sayap partainya, yaitu GPK, AMK dan HAMKA serta FUI, demikian pula dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketiga indikasi ini terus menunjukkan

peningkatan yang sig bahkan di luar aktivitas kampanye, sehingga ada kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan mengalami peningkatan lagi

Pengelompokan sosial berbasis agama dan politik

Yogyakarta adalah sebuah gambaran bagaimana ruang-ruang kota yang bersifat publik telah dibagi ke dalam berbagai ruang-ruang private dengan afiliasi politik atau berbasis kelompok politik tertentu. Khususnya pada ruang publik jalan raya dalam kota Yogyakarta, pembagian dan penguasaan ruang-ruang terlihat dari banyaknya atau dominasi bendera partai di sepanjang jalan tersebut. Hal ini sangat tampak saat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden sebagaimana telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan. Hasil pengamatan penulis menunjukkan fakta-fakta sebagaimana terlampir pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Penguasaan Jalan Raya berbasis Partai Politik dalam Kampanye Pilpres 2019.

No	Pembagian Ruang/Jalan Raya Berdasarkan Kelompok/Aliran/Politik/Agama	
	Laskar IJO (PPP)	Laskar Abang (PDIP)
1	JL. Kauman	JL. Mataram
2	JL. KH. Ahmad Dahlan	JL. Wijilan
3	JL. Nyi Ahmad Dahlan	JL. Suryoputran
4	JL. K.H. Wahid Hasyim	JL. Panembahan Mangkurat
5	JL. S. Parman	JL. Panembahan Senopati
6	JL. Mayjen Sutoyo	JL. S. Parman
7	JL. Ibu Ruswo	JL. Ireda
8	JL. Urip Sumoharjo	JL. Suharto
9	JL. K.H Agus Salim	JL. Juminahan
10	JL. Ngasem	JL. Suprpto

Sumber: Hasil Pengamatan Penulis Tahun 2022

Table 2 menunjukkan bagaimana jalanan di Kota Yogyakarta sebagai ruang publik telah berubah menjadi ruang atau jalanan yang private, meskipun sifatnya temporer yaitu pada saat kampanye saja. Hasil penelusuran dan pengamatan menunjukkan bahwa ruas-ruas jalanan tertentu di Kota Yogyakarta telah dikuasai berdasarkan dua

kelompok partai pendukung partai, yaitu Partai persatuan Pembangunan (PPP) yang disebut sebagai partai atau “laskar Ijo” dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut sebagai partai atau “laskar Abang”. Dari 20 ruas jalan raya yang diamati dalam Kota Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 2 masing-masing 10 diantaranya merupakan ruas jalan dikuasai oleh masing-masing partai berdasarkan keberadaan secara dominan bendera partai masing-masing.

Penguasaan ruang-ruang publik berupa jalan raya berdasarkan pengamatan selama musim kampanye pilkada dan pilpres, semakin menegaskan bahwa jalan raya adalah ruang utama dimana intensitas konflik dan ketegangan terjadi, khususnya saat berlangsungnya aktivitas kampanye yang memobilisasi massa simpatisan partai dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Yang menarik dari fenomena penguasaan ruang-ruang publik berupa ruas jalan raya adalah telah disepakatinya sebuah ikrar bersama sejak tahun 1999 antara petinggi partai dengan pihak kepolisian untuk tidak melewati ruas-ruas jalan tertentu yang menjadi basis masing-masing partai. Sebagaimana pernyataan sesepuh Masjid Jogokaryan yang dimuat dalam Koran Tempo (28/01/2019) sebagai berikut:

“Padahal sejak pemilu tahun 1999, sudah ada kesepakatan dari Kapolda DIY saat itu, bahwa massa PDIP di larang konvoi di area Jogokariyan, kok sekarang bisa masuk ? . “Simpatisan PDIP dan PPP sendiri selama ini di Yogya tak pernah akur dan kerap terlibat ricuh, terlebih saat masa kampanye pemilu. Zona massa PDIP dan PPP pun dibagi berdasarkan warna dominan partai itu, yakni zona merah dan zona hijau. “Nah, ini kok mereka (massa konvoi PDIP) bisa masuk zona hijau, apa sudah ada perubahan kebijakan?” (<https://nasional.tempo.co/read/>)

Adanya penguasaan ruang, khususnya ruas jalan di Kota Yogyakarta memang menjadi problem utama dalam menjaga kondusifitas selama berlangsungnya kampanye karena basis-basis massa seringkali tidak bisa dikontrol. Berdasarkan kondisi obyektif ini pihak kepolisian mengambil langkah preventif untuk mengatasi ketegangan dimaksudkan dengan melakukan pengamanan dengan menempatkan personil pada titik-titik singgungan yang menjadi zona penguasaan masing-masing simpatisan partai. Sebagaimana ditegaskan oleh Kapolresta Kota Yogyakarta yang dimuat dalam media online sebagai berikut:

“"Kita sudah lakukan pemetaan daerah-daerah rawan konflik terkait dengan pemilu. Di Yogya ini rawan konflik, gesekan antara laskar-laskar hijau dengan laskar-laskar merah. Kami juga telah melakukan pemetaan pengamanan pemilu di Kota Gudeg. Pemetaan itu khususnya menjelang jadwal kampanye akbar yang dimulai pada 24 Maret hingga 13 April. Beberapa titik ada di Ngabean titik singgung antara basis hijau (PPP) dan merah (PDI Perjuangan). Daerah Jogokariyan kita juga petakan pernah terjadi konflik kan di situ. Kemudian daerah Warungboto itu daerah basis. Kita sudah letakkan (personil) berdasarkan peta ini ketika melakukan pengamanan. Kita bisa atur jalurnya apakah merah atau hijau nanti mau lewat kita atur jalan yang aman,” kata dia.

(<https://kumparan.com/kumparannews/polisi-petakan-daerah-rawan-konflik-di-yogya-jelang-kampanye>)”

Jika mencermati fenomena penguasaan ruang-ruang sebagaimana dipaparkan, tampak bahwa ruang publik Yogyakarta bukanlah ruang yang aman dan bebas, tetapi telah menjadi ruang politik yang tidak aman karena telah menjadi arena konflik kepentingan antara berbagai kelompok atau partai politik yang hingga sekarang terus berlanjut.

Penguatan Kelompok Berafiliasi Partai di Yogyakarta Tahun 2019

Seiring semakin terbukanya keran kebebasan berorganisasi, maka perkembangan organisasi sosial kemasyarakatan juga semakin mengalami peningkatan. Khususnya organisasi sosial berbasis/berafiliasi politik. Bahkan berdirinya beberapa partai baru, juga diiringi oleh muncul/dibentuknya organisasi sayap partai. Bertambah dan meningkatnya jumlah organisasi sayap partai mengindikasikan soliditas masyarakat kota berbasis politik. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Penguatan Organisasi Sosial Berbasis Agama dan Politik

No	Organisasi Kemasyarakatan Berafiliasi Partai Politik	
	PPP	PDIP
1	GPK	Tentara langit
2	HAMKA Kauman/Hamka Darwis	Barisan Muda Indonesia
3	AMK (Angkatan Muda Ka'bah)	Taruna Merah Putih
4	HMK (Himpunan Muda Ka'bah)	Aliansi Masyarakat Yogyakarta
5	BMK (Barisan Muda Ka'bah)	Laskar Banteng Yogya
6	Joxin	Aliansi Lascar Banteng
7	Forum Ummat Islam	Laskar Randu Alas
8	Muslim Green Zone	Laskar Bajuningrat

Sumber: <http://www.indojayanews.com/27/01/2022>; <https://jogja.tribunnews.com/2014/04/06/>

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing memiliki organisasi sayap yang selama ini sudah dikenal dengan baik oleh warga Yogyakarta. Organisasi seperti Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan FUI misalnya adalah sayap PPP yang sudah dicap sebagai organisasi sayap yang radikal dan dianggap seringkali

meresahkan masyarakat karena berbagai tindakan brutal yang dilakukannya, meskipun dengan dalih agama. Demikian halnya dengan Joxin, merupakan kelompok pemuda legendaris yang dikonotasikan sebagai basis preman dan berkonsentrasi di Kampung Kauman. Secara historis, Joxin memang dikenal sebagai komunitas preman, namun sekarang telah bertransformasi menjadi organisasi sayap PPP yang berbasis agama. Demikian halnya dengan beberapa organisasi sayap PDIP, seperti tentara langit adalah organisasi sayap partai yang selama ini seringkali melakukan aktivitas kampanye dengan mobilitas massa yang banyak dan terkadang brutal.

Masing-masing kubu dari kedua partai dalam realitasnya seringkali menggunakan jargon-jargon agama dan ideologi dan agama dalam berkampanye dimana organisasi saya merupakan ujung tombak dalam melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran. Dalam banyak kasus, organisasi sayap seringkali menjadi dalang dari setiap ketegangan yang terjadi di antara mereka. Bahkan dengan masyarakat di beberapa kampung di Yogyakarta seringkali berhadapan dengan organisasi saya masing-masing partai ini, tergantung konsentrasi basis-basis simpatisan mana yang mereka datangi atau lalui. Fenomena perkembangan organisasi sayap partai, sebagaimana terlihat pada tabel 3, mengindikasikan adanya kecenderungan semakin kuatnya soliditas partai, sebaliknya bisa juga mengindikasikan semakin tinggi dan kuatnya ketegangan dan resistensi sosial warga kampung kota di Yogyakarta.

Jika mencermati perkembangan ketegangan dan disharmonis sosial yang terjadi selama ini di Kota Yogyakarta, baik saat hari-hari biasa, dan secara khusus pada musim kampanye dapat dibaca sebagai sebuah upaya kedua kubu membangun eksistensi dan identitasnya masing-masing. Namun pada saat yang sama justru menunjukkan akan semakin kuat dan tingginya resistensi, ketegangan dan kekerasan di level kampung Kota Yogyakarta.

Aktivitas yang eksklusif/khusus

Polarisasi sosial masyarakat, tidak hanya tampak dari beragamnya kelompok atau organisasi kepentingan, akan tetapi juga ditandai oleh semakin spesifiknya berbagai aktivitas atau kegiatan kelompok masyarakat bersangkutan. Warga kampung kota Yogyakarta yang terpolarisasi berdasarkan kelompok partai, dan organisasi kepentingan lainnya, juga diiringi oleh aktivitas yang mencirikan dan menegaskan identitas kelompok masing-masing. Beberapa aktivitas spesifik dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Muslim United



Gambar 1. Contoh Poster Aktivitas dari Kelompok Masyarakat dengan Identitas Tertentu (Sumber: <https://www.kompasiana.com/ibnujalilalindonesia>)

Muslim United (MU) adalah kegiatan yang berisi dakwah, bazaar dan aktivitas ekonomi lainnya yang diselenggarakan oleh Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Takmir Masjid Gedhe Kauman. Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Pada kegiatan pertama, tagline yang diusung adalah “MUSLIM UNITED DAY #1 JALAN TERUS DIJALAN YANG LURUS (ISTIQOMAH DALAM ISLAM). Bahkan di Facebook panitia MU 1 terpampang gambar dengan tulisan “Jogja kota Hidayah”, seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Contoh Leaflet Muslim United (Sumber: Laman Facebook MU 1, 2019)

Pada pelaksana Muslim United (MU) kedua, mengusung tagline “tagline #Sedulur Saklawase” dengan falsafah luhur dari sultan Hamengkubuwono I, yaitu *Nyawiji* (menyatu), *greet* (penuh semangat), *sungguh* (percaya diri), *ora mingkuh* (penuh tanggung jawab). Baik MU 1 maupun MU 2 keduanya dimaksudkan sebagai upaya menggalang persatuan ummat Islam dari berbagai penjur. Meskipun dimaksudkan sebagai upaya membangun solidaritas umat Islam, akan tetapi yang tampak dari aktivitas ini, khususnya Muslim United 2 adalah sebuah gerakan yang ditengarai oleh berbagai pihak sebagai kegiatan kampanye atau gerakan penolakan terhadap kelompok tertentu. Terlebih dilaksanakan saat menjelang pelantikan presiden terpilih. Selain alasan itu adanya isu lain tentang adanya kelompok HTI yang

'menunggangi' acara muslim United. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa tokoh dalam acara tersebut yang dirumorkan mempunyai afiliasi dengan HTI. Seperti twitter yang ditulis oleh Gun Romli seorang politisi muda PSI dalam twitternya yang dimuat dalam geotimes.co.id sebagai berikut:

"Sudah benar @Keratonjogja tidak memberikan izin pada Muslim United untuk menggelar acara di Masjid Gedhe Kauman karena acara ini sudah ditunggangi oleh pendukung Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)"

Atas dasar kecurigaan tersebut, kegiatan ini ditolak dilaksanakan di Masjid Gedhe Kauman oleh pihak keraton sebagai pemilik masjid. Bahkan upaya pembubaran pada pelaksanaan hari pertama melalui negosiasi pihak polda DIY yang diwakili oleh Kapolda.

(<https://geotimes.co.id/opini/penolakan-acara-muslim-united-dan-upaya-deradikalisasi/>)

Terlepas dari penerimaan dan penolakan berbagai kelompok, akan tetapi aktivitas ini merupakan aktivitas yang khusus dan spesifik ditujukan kepada umat Islam dari kelompok tertentu saja.

2. Dangdut

Dangdut sebagai sebuah seni merujuk pada jenis/gendre music khas yang sudah merakyat. Bahkan dalam berbagai acara formal dan informal di kampung-kampung ataupun di kota, dangdut merupakan gendre music yang paling populer dan digandrungi oleh masyarakat kebanyakan. Khususnya dalam kegiatan kampanye, lagu dangdut atau "dangdutan" merupakan instrumen khusus yang sering digunakan sebagai penarik/mobilitas massa. Oleh karena itu, dangdutan seringkali dikonotasikan dengan sebuah pesta yang semarak dan riuh, atau dengan kelas atau identitas sosial tertentu. Dalam hal ini, dangdut merepresentasikan identitas kelompok tertentu.

Khusus pesta dangdut yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di alun-alun utara pada tanggal 5-6 Oktober 2019, dalam pandangan kelompok Islam para pendukung pasangan 02 atau kelompok Islam yang tergabung dalam Muslim United merupakan kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh para pendukung pasangan 01. Klaim ini terlihat dari adanya pengecualian/perbedaan perlakuan kebijakan dari kedua kegiatan tersebut. Tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Persaingan Acara Massal yang Bersifat Religius dan Pestapora
(Sumber: <https://www.google.com/search?safe>)

3. Eksklusifitas Kampung-Kampung Kota Yogyakarta

Penguasaan ruang-ruang kota di Yogyakarta bukan saja penguasaan ruas-ruas jalan, akan tetapi juga penguasaan perkampungan yang bahkan secara eksklusif dikategorikan sebagai kampung berbasis agama, aliran dan politik. Bahkan seringkali kampung tersebut berasosiasi dengan tokoh politik tertentu

Labeling Kampung Berdasarkan agama, aliran dan politik

Tabel 4. Pembagian Kampung Kota Yogyakarta Berbasis Politik/ Aliran dan Agama

No	Pembagian Ruang /Kampung Berdasarkan Kelompok/ Aliran/Politik/ Agama	
	Kampung Islam/Kampung PPP (Kampung IJO)	Kampung Kejawen/Kampung PDIP (Kampung Abang)
1	Kampung Kauman	Kampung Tegal Kemuning
2	Kampung Suronatan	Kampung Ledok
3	Kampung Karangkajen	Macasan
4	Ngabean	Ngampilan
5	Jogokaryan	Rotowijayan
6	Warungboto	Polowija
7	Gading	Keraton

Sumber: Hasil Survei Penulis 2022

Tabel 4 menggambarkan ruang kampung terpolarisasi dan diklaim sebagai ruang politik dan agama, atau dikontraskan sebagai kampung ijo vs kampung merah.

Berdasarkan penelusuran atau pengamatan di beberapa kampung kota Yogyakarta berdasarkan umbul-umbul dan logo partai yang dominan, tampak bahwa basis-basis massa secara tegas terlihat. Kampung dengan label partai (PPP) atau kampung Ijo meliputi kampung yang menjadi basis Muhammadiyah. Misalnya Kampung Kauman, Notoprajan, Karangkajen, dan Jogokaryan. Sebaliknya kampung-kampung yang dikategorikan sebagai kampung PDIP atau kampung abang adalah kampung yang selama ini dikenal sebagai kampung Kejawan, diantaranya adalah kampung Ngampilan, Tegal kemuning, Kampung Ledok, Rotowijayan dan wilayah Keraton.

Labeling Kampung berafiliasi Tokoh.

1. Kampung Jokowi

Kampung Jokowi adalah kampung yang diberi label oleh para pendukung Jokowi saat pelaksanaan pilpres tahun 2019. Di Jawa Tengah, khususnya di Klaten dan Solo *labeling* Jokowi terhadap kampung-kampung banyak ditemukan. Namun yang tampak pada foto ini adalah salah satu kampung di Sidokarto Godean Sleman.



Gambar 4. *Labeling* suatu daerah dengan atribut atau identitas tertentu 1
(Sumber: <https://www.google.com/search>)

Pemberian label ini tidak saja mengindikasikan sebuah dukungan politik, moral dan bahkan material. Akan tetapi juga mengindikasikan sebuah klaim penguasaan sebuah Kawasan kampung oleh kelompok pendukung berdasarkan partai politik tertentu. Bahkan *labeling* semacam ini sering dikuatkan dengan munculnya kampung relawan para pasangan calon tertentu, misalnya kampung relawan pendukung Jokowi (SAJOJO) seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 5. *Labeling* suatu daerah dengan atribut atau identitas tertentu 2
(Sumber: <https://jogja.tribunnews.com/2018/07/23/>)

2. Kampung Prabowo

Selain munculnya kampung Jokowi, juga muncul kampung pasangan capres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat pilpres 2019 yang lalu. Kampung Prabowo-Sandiaga tampak terlihat dari spanduk/baliho yang terpasang di pinggir jalan sekitar terminal Ngabean Kota Yogyakarta yang merupakan basis pendukung PPP terutama basis Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK). Pada spanduk tersebut bahkan diklaim sebagai kampung 99% pendukung Prabowo dan Sandiaga. Klaim ini menunjukkan solidaritas sosial politik warga kampung sekitar terhadap calon yang mereka dukung. Dukungan semacam ini mengandung suatu pesan dan ekspektasi politik atau dan Fenomena ini, sepanjang penyelenggaraan kampanye para calon. Dari fenomena di atas, tampak bahwa klaim kampung partai tidak saja tampak dari dominannya bendera tertentu, akan tetapi juga tampak dari adanya pemasangan spanduk-spanduk dan baliho tokoh politik atau calon yang mereka usung dalam pilpres.



Gambar 6. Contoh Pemasangan Spanduk dan Atribut Partai Politik di suatu Daerah
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Intensitas konflik dan ketegangan sosial yang berlangsung selama beberapa periode penyelenggaraan pesta demokrasi di Yogyakarta, menunjukkan kecenderungan yang

signifikan. Khususnya periode tahun 2019 intensitas ketegangan mencapai 17 kali dengan eskalasi yang meluas pula ke beberapa kampung di Kabupaten Bantul dan Sleman. Meningkatnya intensitas dan eskalasi konflik serta ketegangan antara kampung-kampung kota di Yogyakarta berimplikasi luas pada beberapa aspek kehidupan sosial masyarakat kampung. Misalnya relasi sosial terputus, ketegangan antar kelompok dan tetangga kampung, ketertiban sosial terganggu hingga kerugian ekonomi. Penguasaan ruang-ruang public perkotaan di Yogyakarta tidak hanya mencakup penguasaan ruas-ruas jalan utama di dalam kota, akan tetapi juga penguasaan rang-ruang beberapa perkampungan berbasis partai politik, aliran dan bahkan agama. Penguasaan ini mencakup penguasaan lahan parkir dan area untuk aktivitas kampanye. Bahkan telah diklaim sebagai kawasan private kelompok atau partai tertentu.

KESIMPULAN

Wacana demokrasi yang dipraktekkan selama ini adalah wacana global yang selalu melekat dan terkait dengan praktek-praktek politik dan kekuasaan. Salah satu fenomena yang seringkali dan rutin dilakukan sebagai bagian dari praktek demokrasi adalah Pemilu atau Pilpres. Namun pada kenyataannya, justru dengan Pilpres yang berlangsung, khususnya di Kota Yogyakarta pada Tahun 2019 justru menimbulkan ketegangan politik dan sosial yang tidak hanya di level elit secara nasional, akan tetapi justru muncul ketegangan dan disharmoni sosial di level kampung. Ketegangan dan disharmoni sosial ini dipicu oleh adanya solidaritas sosial berbasis partai dan kelompok oleh masing-masing simpatisan partai dan para pendukung calon presiden, bahkan telah terjadi klaim kampung sebagai kawasan private dan tabu atau haram dilewati bagi kelompok atau partai tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktek demokrasi lewat pilpres, khususnya di Kota Yogyakarta justru menghasilkan ketegangan yang sangat mendalam dan terus berlangsung yang melibatkan partai tertentu. Disparitas dan jarak sosial semakin renggang. Bahkan sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang santun, kalem bahkan sebagai kota pendidikan justru tercerabut dari akarnya dan tergantikan dengan pencitraan sebagai kota yang tidak aman dan rawan konflik, terutama menjelang pilpres.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Oraimi, S. Z. (2020). 'Diversity and social cohesion in the United Arab Emirates', *RUDN Journal of Sociology*. doi: 10.22363/2313-2272-2020-20-4-837-846.
- Alaverdov, E. (2021) 'Modern Migration Crisis in Europe and the Role of Diasporas in Combating the Mutual Hostility between Newcomers and Host Society', *Journal of Education Culture and Society*, 12(1), pp. 177-186. doi: 10.15503/jecs2021.1.177.186.

- Ammar Zuhar (2014) 'Etnisitas dalam Politik (Studi tentang Strategi Calon Legislatif Etnis Batak dalam Pemilihan Umum Legislatif di Daerah Pemilihan Siak 4 Kabupaten Siak Tahun 2014)', *UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Bannister, J. and O'Sullivan, A. (2013) 'Civility, community cohesion and antisocial behaviour: Policy and social harmony', *Journal of Social Policy*. doi: 10.1017/S0047279412000736.
- Berglund, K. and Schwartz, B. (2013) 'Holding on to the Anomaly of Social Entrepreneurship Dilemmas in Starting up and Running a Fair-Trade Enterprise', *Journal of Social Entrepreneurship*. doi: 10.1080/19420676.2013.777362.
- Christian Welzel, (2006). Democratization as an emancipative process: The neglected role of mass motivations. *European Journal of Political Research* 45: 871-896, 2006 871 doi: 10.1111/j.1475-6765.2006.00637
- Goodman, L. W. (2021) 'Democratization in Asia: Lessons from the Americas', in *Democratization, National Identity and Foreign Policy in Asia*. doi: 10.4324/9781003119159-6.
- Goryacheva, I. Y. (2016) 'Conclusion and outlook', *Comprehensive Analytical Chemistry*. doi: 10.1016/bs.coac.2016.03.011.
- Gupta, A., Sharma, U. and Gupta, S. K. (2021) 'The Role of ESG in Sustainable Development: An Analysis Through the Lens of Machine Learning', in *2021 IEEE International Humanitarian Technology Conference, IHTC 2021*. doi: 10.1109/IHTC53077.2021.9698939.
- Haslinda Syafitri, Warsono Warsono (2020) Primordialisme Dalam Praktek Demokrasi Di Organisasi Kemahasiswaan (Konflik Sosial Dalam Pemira Bem Unesa 2020). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 9, Nomor 3. Tahun 2021, 672-688
- Heru Nogroho (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.1, Mei 2012
- Howie, L. *et al.* (2021) 'Wild and tame zones in times of disharmony: Muslim boys and belonging in a primary school in Melbourne, Australia', *Journal of Youth Studies*. doi 10.1080/13676261.2020.1777265.
- Iska, S. *et al.* (2022) 'Implications of the Pagang Gadai Contract on Disharmony Social Actors in Minangkabau Community', *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. doi: 10.31958/juris.v21i1.5647.
- Jan Aart Scholte (2019). After Liberal Global Democracy: New Methodology for New Praxis, *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.1007/s40647-019-00265-3>.

- John S. Dryzek (2006). *Transnational Democracy in an Insecure World*. *International Political Science Review* 2006; 27; 101. Sage Publication
- John O'Loughlin (2016). *Global Democratization*. Institute of Behavioral Science and Department of Geography University of Colorado Campus Box 487 Boulder, CO. 80309-0487 USA., 2016.
- Keddie, A. (2014) 'Students' understandings of religious identities and relations: Issues of social cohesion and citizenship', *Education, Citizenship and Social Justice*.
- Kristian Stokke (2008). *Democratization in the Global South: From democratic transitions to transformative democratic politics*. Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo, 2018.
- Lars-Erik Cederman, Simon Hug, And Andreas Wenger, (2008). *Democratization and War in Political Science*. *Democratization*, Vol.15, No.3, June 2008, pp.509-524 online DOI: 10.1080/13510340801972247 # 2008 Taylor & Francis.
- Lindah Usman, Atika Marzaman (2019). *Demokrasi Berujung Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa Jembatan Merah, Kab. Gorontalo Utara*. *Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora* , (Semana TECH, 2019)
- Mundt, R. J. (2018) 'Côte d'Ivoire: Continuity and Change in a Semi-Democracy', in *Political Reform in Francophone Africa*. doi 10.4324/9780429498183-11.
- Muhammd Dalhatu (2019). *Cosmopolitan Democracy: Re-Evaluation Of Globalization & World Economic System*. *A master's thesis submitted to the Graduate Faculty in Liberal Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts*, The City University of New York.
- Remmer, KL. (1995) *New Theoretical Perspectives on Democratization*. *Comparative Politics*, Vol. 28, No. 1 (Oct., 1995), pp. 103-122
- Rennuy, N. (2019) 'The trilemma of eu social benefits law: Seeing the wood and the trees', *Common Market Law Review*. doi: 10.54648/cola2019125.
- Walsh, F. (2011) 'Family resilience: A collaborative approach in response to stressful life challenges', in *Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan*. doi: 10.1017/CBO9780511994791.012.
- Walsh, L. *et al.* (2020) 'An ecological case-study of the benefits and challenges of socially-just leadership engaging in "challenging conversations" about social disharmony', *Journal of Educational Administration and History*. doi: 10.1080/00220620.2020.1738361.
- Westerlund, H. *et al.* (2022) 'Visions for intercultural music teacher education in complex societies', *Research Studies in Music Education*. doi: 10.1177/1321103X211032490.